

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga Imani Satriani dan Pudji Muljono	87–95
Implementasi Demokrasi Lokal di Balik Bayang-bayang Otonomi Negara Asrinaldi	96–107
Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau Nurwani Idris	108–116
Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan Erna Setijaningrum	117–127
Seksisme dan Seksualitas dalam Lagu Pop: Analisis Tekstual Lirik Lagu Kelompok Musik Jamrud Netty Dyah Kurniasari	128–138
Konstruksi Sosial Kekerasan dan Vandalisme Mahasiswa Siti Aminah	139–149
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Hetty Antje Geru	150–157
Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penyuluhan Penanganan Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian Fitriani, Irmayani Noer, Tatang Mulyana, Bina Unteawati, Sutarni	158–162

Konstruksi Sosial Kekerasan dan Vandalisme Mahasiswa

Siti Aminah¹

Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

Recently quite rarely that students moral movement had become political movement. The students violence in Makassar had brought shame to the students and universities existence. This study aimed to construct social factors on a series of demonstrations and protests phenomenon of students in Makassar that lead to acts of violence and vandalism. The phenomenon was contradictory to the existence and attributes of students as intellectual actors and agents of change. This study used qualitative approach. This method presented the research design, data collection procedures, data recording procedures, data analysis procedures and verification measures. Violence and vandalism of students adopting political expression patterns that transcend conventional boundaries, giving rise to unrest in the community, campus, and the government. In conclusion, sociopolitical structure factor at the local and national be a trigger and reinforcing the emergence of violence and vandalism. Political issues are often the major factor rather than issues that are fighting for the claims of morality

Key words: demonstration, violence, vandalism, social construction, socio-political structures

ABSTRAK

Akhir-akhir ini jarang gerakan moral mahasiswa menjelma menjadi gerakan politik, kecuali untuk meraih kekuasaan. Peristiwa kekerasan mahasiswa di kota Makassar telah mencoreng dunia pendidikan tinggi dan eksistensi mahasiswa. Studi ini bertujuan mengkonstruksi faktor-faktor sosial atas rangkaian fenomena demonstrasi dan unjuk rasa mahasiswa di Makassar yang berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Fenomena tersebut kontradiktif dengan eksistensi dan atribut mahasiswa sebagai aktor intelektual dan agen perubahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini dipaparkan tentang asumsi-asumsi desain penelitian, prosedur pengumpulan data, prosedur pencatatan data, prosedur analisa data dan langkah-langkah pembuktian. Kekerasan dan vandalisme mahasiswa mengadopsi pola-pola ekspresi politik yang melampaui batas-batas konvensional, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, kampus, dan pemerintah. Kesimpulannya, faktor struktur sosial politik di tingkat lokal maupun nasional menjadi pemicu dan penguat terjadinya kekerasan dan vandalisme itu. Isu-isu sosial politik acap mengedepan daripada isu-isu yang memperjuangkan klaim-klaim moralitas.

Kata kunci: demonstrasi, kekerasan, vandalisme, konstruksi sosial, struktur sosial politik

Akhir-akhir ini jarang gerakan moral mahasiswa menjelma menjadi gerakan politik, kecuali untuk meraih kekuasaan. Peristiwa kekerasan mahasiswa di kota Makassar telah mencoreng dunia pendidikan tinggi dan eksistensi mahasiswa. Mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, keberpihakan mahasiswa pada kepentingan masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan mengganggu kepentingan umum. Basis tindakan kekerasan mahasiswa adalah nilai-nilai etis/moral dan nalar, dan hal itu menjadi acuan dalam setiap tindak tanduknya. Mahasiswa memiliki kebutuhan untuk aktualisasi diri, dan hal ini terwujud dalam peran

sosialnya melalui pemikiran dan kepemimpinannya dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Kekerasan yang dijalankan mahasiswa dapat dipahami sebagai strategi untuk memenangi pertarungan antar mahasiswa/kelompok mahasiswa berdasar garis etnik maupun antar ideologi. Tak dapat diingkari, ada peran dari konteks politik lokal kota Makassar dan nasional terhadap terjadinya aksi-aksi kekerasan dan vandalisme mahasiswa.

Kekerasan mahasiswa cenderung mengarah pada perjuangan mencapai tujuan politik dan nirpolitik sehingga mendorong terjadinya pergulatan untuk perebutan kekuasaan baik dalam arena kampus

¹ Korespondensi: Siti Aminah, Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga 4-6, Surabaya 60286. Telepon 031 5011 744, E-mail: saminah_fisip@unair.ac.id

maupun di luar kampus. Aksi-aksi kekerasan dan vandalisme mahasiswa didukung oleh ketersediaan struktur kesempatan politik. Porta & Diani (2006) bahwa dalam gerakan sosial dipastikan ada kerjasama strategis antara aksi dan aktor dengan aktor-aktor kelembagaan politik formal ada. Data penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada aksi-aksi gerakan sosial politik yang berdiri sendiri, ada aliansi antara aktor-aktor pada aksi-aksi kekerasan itu dan tokoh-tokoh elite formal di lembaga pemerintahan (DPRD, eksekutif). kalangan elite di kampus juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan kekerasan.

Aksi-aksi kekerasan mahasiswa merupakan hasil dari jaringan interaksi informal (elite politik), yang melibatkan keragaman individu, kelompok dan/atau organisasi. Suatu jaringan yang sanggup mempromosikan kerangka interpretasi dan sirkulasi sumber daya penting bagi aksi bersama. Kemudian mahasiswa itu masuk pada situasi konflik (sosial, politik, ekonomi, dan kultural). Adanya kesempatan politik maka aksi-aksi mahasiswa dapat berlangsung. Porta & Diani (2006) menjelaskan bahwa gerakan sosial itu dapat berhasil apabila tersedia kesempatan politik, konteks ketertampungan masalah-masalah sosial, dan konteks komunikasi yang membuka kemungkinan bagi artikulasi masalah dan penyebaran gagasan. Ketersediaan struktur kesempatan politik menjadi hal yang sangat penting karena tanpa struktur kesempatan tidak dimungkinkan terjalin kerjasama strategis antara aksi dan aktor gerakan sosial dengan aktor-aktor kelembagaan politik formal. Oleh karena itu, keberhasilan suatu gerakan sosial ada kaitannya dengan faktor-faktor ketersediaan aliansi yang berpengaruh, toleransi bagi protes di kalangan elit, derajat keterbukaan atau tertutup akses politik formal, derajat stabilitas atau instabilitas aliansi politik, ketersediaan potensi kerjasama strategis, dan konflik politik di antara dan didalam elite.

Ada keterpecahan yang menyebabkan bentrokan identitas antar mahasiswa. Hal ini terlihat dari konflik antar fakultas dalam universitas maupun antar universitas. Identitas mahasiswa dibangun atas dasar solidaritas dan keyakinan yang sama untuk memahami fenomena sosial politik yang ada di lingkungan sekitarnya. Fenomena itu kemudian dimaknai sebagai realitas yang benar-benar ada yang mencerminkan ketimpangan, ketidakadilan, dsb. Realitas itu dipandang oleh mahasiswa sebagai hal yang meresahkan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan realitas itu dimanipulasi oleh

mahasiswa dan akhirnya memicu konflik vertikal antara mahasiswa dan pemerintah dan horizontal antara mahasiswa dan mahasiswa, dll. Kekerasan mahasiswa bukan semata-mata sebagai potret dari arena pertarungan antara mahasiswa dengan pemerintah, tetapi mahasiswa dengan berbagai pihak dan peristiwa. Kenyataan tentang kekerasan mahasiswa di Makassar tidak seperti gambaran yang ditayangkan oleh media televisi atau cetak. Karena mahasiswa dalam berelasi dengan sesama mahasiswa dan pemerintah serta aparat ideologi (keamanan) terkait dengan konteks lokal, struktur sosial, dan lingkungannya tempat mahasiswa mengalami transformasi peran dari aktor intelektual menjadi pejuang yang bertindak penuh kekerasan yang mengabaikan norma-norma sosial budaya yang berlaku umum.

Metode

Studi ini berupaya merumuskan penjelasan yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan koreksi dan masukan atas kebijakan pendidikan tinggi dan pengelolaan kegiatan mahasiswa di kampus baik di tataran lokal maupun nasional. Konkritnya, keseluruhan analisis dan interpretasi data penelitian diharapkan dapat mengkonstruksi realitas sosial budaya penyebab kekerasan dan vandalisme sekaligus merumuskan rekomendasi akademis dan praktisnya. Karena itu metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Metode kualitatif dapat memberikan penjelasan rinci tentang faktor-faktor sosial yang menyebabkan terjadinya kekerasan, dinamika, dan dampaknya pada mahasiswa sebagai aktor intelektual yang memiliki peran dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Penelitian ini juga berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan dalam tataran praktis dan akademis untuk mengurangi kekerasan mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasinya dan kepentingannya. Sehingga analisis penelitian ini mengutamakan penjelasan tentang mengapa dan bagaimana faktor-faktor sosial khususnya struktur sosial politik memengaruhi munculnya kekerasan mahasiswa baik secara individual maupun kolektif. Peneliti menjelaskan keterkaitan faktor kultur kekerasan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar dengan perilaku kekerasan dan vandalisme. Bagaimana budaya kekerasan itu dibangun dan dipraktikkan mahasiswa dalam hidup kesehariannya. Untuk menafsirkannya data yang diperoleh dibutuhkan penggalian data dengan

menggunakan metode analisis kualitatif dengan menginterpretasi pandangan dan pendapat informan sesuai dengan konteks dan pengalamannya.

Unit analisis penelitian ini ialah mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat. Ketiga pihak ditempatkan sebagai aktor yang berperan dalam terjadinya aksi-aksi kekerasan baik untuk merespon kebijakan atau isu nasional maupun isu lokal. Subjek penelitian ini adalah para informan sebagai yang mewakili institusi dan pribadi. Informan yang mewakili institusi terdiri institusi pendidikan tinggi (universitas), organisasi kemahasiswaan (BEM), ekstra kampus (HMI, KNPI, PMII dll), pemerintah (DPRD dan kepolisian), serta media massa. Sedangkan informan pribadi adalah mahasiswa pelaku kekerasan, aktivis, mantan aktivis dan beberapa anggota masyarakat. Pemilihan informan itu didasari pertimbangan tentang kemampuan, kompetensi untuk memberikan informasi data yang khusus dan dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini (Newman 2003, Bryman 2004).

Hasil/Pembahasan

Problematika Politik Kekerasan Mahasiswa

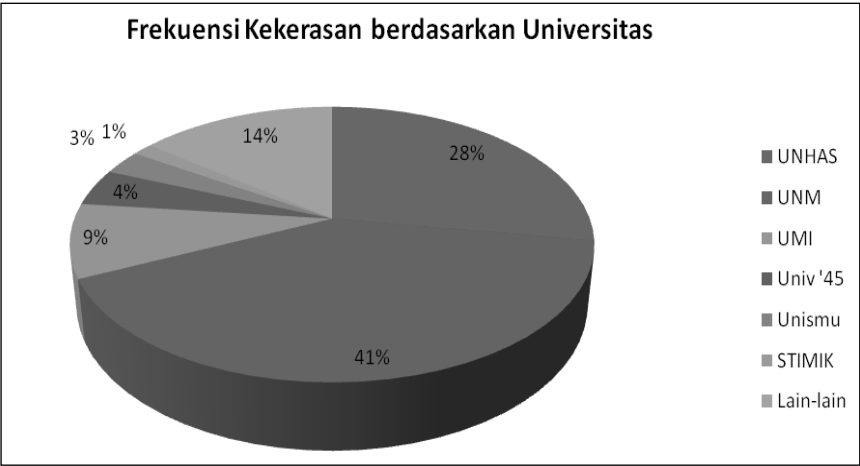
Mahasiswa adalah pembelajar, juga bisa disebut sebagai aktor intelektual yang mengemban fungsi sebagai agen perubahan dan kekuatan moral di masyarakat, bangsa, dan negara. Tetapi perkembangan bangsa ini telah merubah eksistensi mahasiswa, bukan sebagai kekuatan kontrol yang ampuh terhadap terjadinya kemencengan-kemecengan kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor di kampus, tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Mahasiswa sebagai salah satu lakon reformasi

Negara, juga menjadi kekuatan kolektif yang berorientasi praktis, jangka pendek dan sempit serta parsial. Mahasiswa sering bergolak dan bertindak untuk meraih tujuan praktis itu. Fisher (2000), perbedaan atau ketidaksesuaian pendapat antara dua orang/kelompok atau lebih tentang isu tertentu bias memicu perbedaan pendapat, tawuran dan kerusakan sosial.

Mahasiswa dalam kondisi saat ini tidak semata-mata membela kepentingan masyarakat tetapi membela kepentingan dirinya, kelompoknya. Padahal dalam kehidupan nyata, masyarakat masih membutuhkan mahasiswa sebagai kekuatan moral untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya daripada kemampuan emosinya. Dalam konteks ini mahasiswa hanya diperbolehkan bergerak dalam tataran kegiatan keilmuan-ilmiah, dan bukan dalam tataran praksis gerakan (politik/sosial).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan mahasiswa di Makassar terjadi akibat dari solidaritas internal yang kuat dalam fakultas dan ekistensi mahasiswa sebagai kekuatan kolektif. Kedua hal ini menjadi mesin penggerak kekerasan. Kekerasan bukan sesuatu yang berada di luar diri mahasiwa, tetapi menjadi bagian yang diciptakan dan digunakan oleh mahasiswa untuk memperjuangkan berbagai isu sosial politik yang ada di masyarakat seperti ketimpangan, kesenjangan, ketidakadilan, dsb. Yang menarik untuk dijelaskan dalam hal ini adalah mengapa mahasiswa di Kota Makassar menggunakan cara kekerasan dan perusakan?

Fenomena-fenomena kekerasan yang dilakukan mahasiswa seakan-akan sudah menyatu dengan karakter mahasiswa. Kekerasan dapat dipahami dari aspek budaya. Kekerasan adalah produk kultur dan karenanya tidak menutup kemungkinan budaya itu direproduksi.



Sumber: Data diolah dari data Kekerasan yang dihimpun oleh Polda Sulawesi Selatan tahun 2010–2011

SK No. 155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. Ini merupakan bunyi dari pasal 3 Keputusan Menteri Pendidikan No. 155 tahun 1998. Ada kebijakan pendukung lain, yaitu Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 26/Dikti/Kep/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus, intimidasi dan ancaman pengurangan nilai terhadap mahasiswa yang kritis terhadap kehidupan kampus, pelarangan demonstrasi sampai pada represifitas secara langsung dengan kekerasan. SK tersebut memberikan keleluasaan dan jaminan penuh kepada mahasiswa untuk lulus tepat waktu. SK itu berimplikasi pada pengetatan kuliah dan sistem presensi, pemberlakuan kode etik, jam malam, larangan bagi organisasi ekstra (ormas) dan partai politik membuka sekretariat atau perwakilan di kampus. Pasal 13 menetapkan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Peraturan-peraturan itu bukan mengurangi daya kritisisme mahasiswa justru meningkatkan daya kritisnya. Mahasiswa ingin memperoleh pengalaman praktis, selain pengalaman dalam aspek teoretik, khususnya pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah menguji kemampuan kritis dan kepekaannya dalam menilai realitas sosial yang ada. Kebutuhan praksis mahasiswa ini bisa diwujudkan melalui organisasi intra dan ekstra kampus. Namun kecenderungannya, organisasi ekstra kampus lebih diminati.

Salah satu pemikiran yang mendasari adalah organisasi dapat digunakan sebagai arena untuk menyalurkan aspirasinya politiknya, selain itu juga untuk mencari pengalaman politik praktis, sehingga mereka menjadi kader organisasi ekstra tertentu. Hal ini dapat melengkapi diri mahasiswa antara yang akademis dan praktis. Kampus secara ideal adalah arena pendidikan dan tidak dibenarkan untuk dijadikan arena politik praktis partai politik apapun.

Konstruksi Sosial Kekerasan dan Vandalisme Mahasiswa

Mahasiswa ditempatkan dalam ruang kampus diasumsikan dapat steril dari politik, dan kebijakan itu berlaku sampai sekarang dengan beberapa modifikasi kebijakan yang mengatur mahasiswa. Pada masa Orde Baru ada kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978. Konsep tersebut sebagai upaya

dalam mengarahkan mahasiswa untuk konsentrasi pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik praktis.

Melalui keputusan Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KeP/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus, pemerintah menghubungkan tatanan makro dan mikro, tatanan di tingkat nasional dan lokal perlu dipertemukan, sehingga mahasiswa dan seluruh sivitas akademika dapat mengawal kegiatan pendidikan dan belajar mengajar. Kampus tidak menjadi ajang politisasi kepentingan kelompok tertentu tetapi kampus menjadi arena belajar dan pendidikan.

Organisasi dalam ruang lingkup dunia kampus adalah organisasi mahasiswa yang terbagi menjadi dua, yakni organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus. Organisasi intra kampus dimaknai sebagai organisasi yang ada dalam pengawasan kampus di mana kebijakannya selalu dikonfirmasi dengan kebijakan kampus yang berciri khusus bahwa organisasi intra kampus mendapat sumbangan dana dari kampus karena keberadaannya sebagai wadah penyalur dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Perwujudan dari organisasi berupa UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa): musik, teater, keagamaan dan kerohanian, pecinta alam, lembaga pers mahasiswa, pramuka, resimen mahasiswa, bela diri, dan lain sebagainya. Resolusi terhadap problematika kekerasan mahasiswa memerlukan regulasi kebijakan pendidikan yang komprehensif dan integratif lintas sektor.

Proses pemaknaan atas kekerasan sebagai realitas empiris dan objektif selalu melibatkan nilai-nilai tertentu dari subjek yang memaknainya. Kekerasan mahasiswa di kota Makassar yang penulis lakukan dalam tahun 2011 menunjukkan bahwa kekerasan tersebut pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi sosial mahasiswa yang memiliki kepentingan tertentu. Semua proses konstruksi mulai dari memilih isu, lokasi, bentuk kekerasan yang akan ditampilkan/dipilih, aktor yang akan terlibat, dan lain sebagainya dilakukan secara rasional.

Mahasiswa sebagai aktor kekerasan mendefinisikan nilai dan perilaku yang sesuai dengan nilai kelompok dan perilaku, serta nilai yang dipandang sebagai nilai yang harus diperjuangkan. Nilai-nilai itu bukan sesuatu yang alamiah, melainkan nilai itu dibangun dan disepakati bersama dalam kelompok mahasiswa itu. Dengan konstruksi nilai itu, mahasiswa melakukan kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, turun ke jalan yang semuanya itu

mencerminkan nilai-nilai dan tindakan kekerasan yang nyata dan pada akhirnya menjadi realitas keseharian di kota Makassar. Ada persoalan yang relevan disampaikan dalam hal ini adalah bagaimana mahasiswa melakukan kekerasan dan vandalisme?

Kekerasan yang ditampilkan mahasiswa di dalam kampus, antar fakultas dalam suatu universitas maupun antar kampus yang melibatkan organisasi ekstra kampus merupakan refleksi dari realitas sekaligus sebagai konstruksi dari realitas. Ada relasi sosial kultural antara kekerasan mahasiswa dengan norma-norma dan identitas etnis yang ada. Sehingga kekerasan mahasiswa di kampus khususnya kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa yang direpresentasi oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai contoh adalah konstruksi sosial karena sengaja kekerasan itu dipertontonkan oleh mahasiswa FT sebagai bentuk kekuatan dari identitas kolektifnya sebagai mahasiswa yang lebih unggul daripada mahasiswa di luar FT. Identitas kolektif di kalangan mahasiswa FT merupakan identitas yang mengandung nilai-nilai arogansi yang melekat dan diwariskan dari generasi ke generasi dari angkatan ke angkatan.

Dalam konteks ini kekerasan itu tidak ada corak perjuangan akan kepentingan besar atau urgensi untuk mengakomodasi kritik dan kepentingan masyarakat luas. Ini artinya, motivasi mahasiswa melakukan kekerasan, kerusakan kampus berbeda dengan kekerasan mahasiswa masa rejim Orde Lama maupun Orde Baru. Karena itu, kekerasan mahasiswa tidak dapat dihentikan dengan regulasi melalui kebijakan skorsing, *drop out* dll (sebagai bentuk sanksi) saja, melainkan perlu kebijakan lebih lengkap yang dapat mengakomodasi pluralitas kepentingan internal mahasiswa dalam fakultas dan universitas.

Kekerasan mahasiswa pada saat ini mempunyai realitas yang berbeda dengan kondisi masa-masa sebelumnya. Kekerasan yang diawali dengan unjuk rasa bisa jadi dipahami sebagai sebuah pilihan rasional dari sebuah situasi yang mendesak, tetapi bisa jadi tidak demikian. Pengulangan cara-cara kekerasan yang dilakukan mahasiswa dapat ditafsirkan sebagai indikasi dari lemahnya atau berkurangnya validasi pendidikan moral dan ajaran etika kebersamaan dalam lingkungan akademik. Sistem pendidikan kampus perlu dikaji dalam konteks ini. Sistem pendidikan tinggi di kampus bukan semata-mata mengajarkan pengetahuan normatif, tetapi juga praksis akademis. Kurikulum tidak seharusnya membelenggu sikap, moral, dan

mental mahasiswa. Justru mahasiswa bagian dari masyarakat, membutuhkan kurikulum itu untuk acuan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga kehidupan kampus dan masyarakat menjadi harmonis dan teratur.

Dunia kampus sebagai institusi pendidikan bersifat plural. Pluralitas mahasiswa melebur dalam satu identitas masyarakat akademik. Identitas ini mengalami cedera sosial politik akibat ketidakmampuan mahasiswa memahami kurikulum dan mempraktikkan ilmunya. Keberingasan menjadi ciri yang menonjol di kampus dan melekat dalam diri mahasiswa. Meski mahasiswa Makassar tidak sepenuhnya menerima pencitraan buruk itu, tetapi wacana dominan tindak keberingasan/kekerasan yang telah dipertontonkan mahasiswa kepada masyarakat luas di dalam dan di luar Makassar telah mengantarkan pentingnya memahami dan mencari tahu aspek sosial yang melatari dilakukannya tindak kekerasan/keberingasan itu dengan menggunakan perspektif struktural.

Karakteristik mahasiswa yang beragam di masyarakat memberikan dinamika tersendiri bagi kampus dan juga mahasiswa sebagai individu dalam mengaktualisasikan jati dirinya. Proses pengaktualisasian jati diri inilah mahasiswa mudah terkoptasi pada segmen primordialistik dan fanatisme sempit yang dianggap layak dipertahankan bahkan ditularkan pada generasi-generasi selanjutnya. Doktrinasi nilai tertentu itu berlanjut menjadi sebuah tradisi yang mengarahkan mahasiswa menjadi energi baru khususnya pada penerimaan mahasiswa baru, walaupun harus tetap diakui bahwa progresivitas pencerahan keilmuan khususnya pada lembaga kemahasiswaan tetap berjalan. Secara umum, peranan lembaga kemahasiswaan berangsur-angsur dilumpuhkan oleh birokrasi kampus, sehingga proses pendewasaan dan pencerahan ditempuh dengan kegiatan-kegiatan di luar ruang perkuliahan. Ini merupakan problematika yang dirasakan mahasiswa saat ini. Proses belajar di ruang kuliah dipandang tidak memadai untuk menjalankan peran sebagai mahasiswa (aktor perubahan). Kecenderungan seperti itu akibat kebijakan nasional yang telah memunculkan dualisme pembagian organisasi mahasiswa yang berlaku semenjak masa pemerintah Orde Baru. Pemerintah pada masa itu berkepentingan untuk membatasi gerakan mahasiswa yang dianggap menjadi antek atau kaki tangan dari partai politik. Pada masa kini juga masih menampakkan kecenderungan demikian.

Faktor-Faktor Sosial Pemicu Kekerasan: Habitus Mahasiswa

Perubahan politik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya kekerasan di kampus dan di luar kampus. Mahasiswa menjadi aktor penggerak yang menentukan keberhasilan program/tujuan organisasi. Dalam beberapa kasus, isu nasional menjadi salah satu pemicu dilakukannya kekerasan mahasiswa. Situasi sistem politik yang menjunjung demokrasi, keterbukaan dan inkusi partisipasi masyarakat menyebabkan setiap orang untuk mengeskpresikan aspirasi dan kepentingannya dengan cara-cara demokratis. Otoritas dominan dalam konteks ini terlihat dari serangkaian regulasi kebijakan pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam berbagai bentuk, baik keputusan Menteri maupun Peraturan Pemerintah.

Kecenderungan kekerasan dan vandalisme mahasiswa Makassar untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya secara sengaja atau tidak telah melemahkan kearifan kultur lokal. Masyarakat tidak hanya menjadi rentan dan dirugikan dengan perilaku mahasiswa itu, tetapi di dalam kehidupan nyata masyarakat telah ada kondisi (kemiskinan) yang secara empirik dimanfaatkan secara sistematis oleh aktor intelektual untuk mencapai tujuan tertentu. Pemecahan masalah kerusakan mahasiswa di Makassar dengan berbagai implikasi yang timbul, tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan kerusakan, demonstrasi anarkis, kekerasan saja, melainkan harus ditempatkan sebagai isu penting dan kritis yang perlu dianalisis dalam kerangka regulasi aktivitas mahasiswa dan kebijakan pendidikan tinggi yang menyangkut penataan kurikulum dan partisipasi politik di tingkat organisasi intra dan ekstra kampus.

Dilacak dari perjalanan perlawanan mahasiswa kepada pemerintah pada masa Orde Baru dan Orde Lama umumnya banyak dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan menimbulkan berbagai bentuk kerusakan tidak muncul sesering sekarang. Gerakan dan perjuangan politik mahasiswa saat itu mencerminkan sosok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Kritik-kritik sosial politik terhadap pemerintah dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif, bukan destruktif. Pemerintah juga memiliki kepekaan dalam merespon koreksi mahasiswa itu. Kondisi itu tercipta karena didukung dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan mahasiswa sebagai aktor yang apolitis (depolitisasi mahasiswa melalui kebijakan NKK/BKK). Dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, mahasiswa kembali menjadi garang dan korektif terhadap

kebijakan-kebijakan pemerintah. Indikasi ini ditunjukkan dari fakta sejarah, mahasiswa berhasil menjadi aktor yang dapat menghantarkan perubahan sistem politik Indonesia dari otoriter ke demokrasi. Habitus mahasiswa, khususnya di kota-kota besar di Indonesia menunjukkan fenomena yang hampir sama—demonstrasi yang diikuti kekerasan dan vandalisme.

Habitus mahasiswa berbeda-beda dari setiap kota tetapi secara umum sama. Perbedaan habitus terkait dengan posisi mahasiswa dalam kehidupan sosial dan konteksnya, tidak setiap mahasiswa memiliki kebiasaan yang sama. Bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan/daya nalar yang tinggi diasumsikan memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku yang berbeda dengan mahasiswa yang lebih mengutamakan emosi dan egonya dalam memahami dan menafsirkan realitas politik yang ada di sekitarnya. Mahasiswa yang menduduki posisi dalam struktur organisasi kemahasiswaan intra kampus (BEM, dll) akan memiliki orientasi sikap dan perilaku yang berbeda dengan yang berada di luar struktur organisasi kemahasiswaan intra kampus dan ekstra kampus. Dalam konteks ini habitus mahasiswa menjadi fenomena kolektif dan juga individual. Habitus memungkinkan seseorang memahami dunia sosial dan politik, tetapi dengan adanya banyak habitus mahasiswa berarti kehidupan sosial dan struktur sosial politik menyebabkan aktor-aktor mahasiswa berbeda.

Sikap dan perilaku mahasiswa pada dasarnya disesuaikan dengan masa dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Mahasiswa tidak bisa melepaskan konteks sosial kulturalnya dalam kehidupan kesehariannya. Artinya, aksi-aksi kekerasan mahasiswa memiliki hubungan dengan situasi dan kondisi yang ada. Mahasiswa adalah agen/aktor yang secara akademik memiliki kemampuan berpikir kritis, mengutamakan nalar dalam berpikir dan bertindak dan menjunjung tinggi moral dalam mencari kebenaran. Tetapi kondisi mahasiswa di Makassar saat ini sudah memprihatinkan, hampir tidak ada hari tanpa kekerasan.

Preferensi mahasiswa untuk melakukan praktik kekerasan merupakan cerminan dari struktur sosial yang ada di sekitarnya. Apa yang dilihat dan dipahami oleh mahasiswa kemudian ditafsirkan, diinternalisasi dalam kehidupannya kesehariannya di kampus dan di luar kampus dan hal ini berlangsung terus menerus. Mahasiswa menjadi terbiasa untuk mempraktikkan kekerasan.

Collins (1975) perilaku manusia khususnya individu terus-menerus berjuang untuk memperbaiki posisinya dalam dimensi stratifikasinya (posisi

ekonomi, prestisenya, dan kekuasaan politik). Sumber-sumber material itu sangat penting dalam menentukan posisi seseorang dalam sistem stratifikasinya. Individu yang berbeda dalam kontrolnya terhadap alat produksi mental, produksi emosional, dan kekerasan atau kekuasaan memaksa. Pentingnya produksi mental (sebagaimana dianalisis oleh Marx) yang dikembangkan oleh kelompok yang berkuasa dan mempromosikan suatu ideology yang melegitimasi posisi dominasinya. Alat produksi mental meliputi sistem pendidikan dan media massa.

Mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik (FT) terus-menerus memproduksi nilai-nilai superioritas sebagai suatu fakultas yang memiliki nilai lebih daripada fakultas lain di Universitas Hasanudin (UNHAS). Caranya adalah membangkitkan emosi kebanggaan dari setiap individu mahasiswa hingga nilai dan emosi itu menjadi kesadaran kolektif mahasiswa FT.

Alat produksi emosional menunjuk pada sumber-sumber yang terlibat dalam menghasilkan ikatan-ikatan emosional pada masyarakat, terutama pada mereka yang berada dalam posisi memerintah. Ikatan emosional yang diciptakan melalui kesamaan etnis itu tidak terjadi secara spontan, keterlibatan individu-individu dalam kekerasan tidak seluruhnya mengesampingkan begitupun saja kepentingan-kepentingan pribadi yang beragam. Terciptanya solidaritas emosional tidak menggantikan konflik, tetapi merupakan salah satu alat utama yang digunakan dalam konflik.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditafsirkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam arena fakultas juga dipengaruhi oleh keberadaan organisasi ekstra kampus di mana mahasiswa itu menjadi kadernya. Tak dipungkiri bahwa organisasi ekstra kampus yang solid dapat berfungsi meminimalisasi konflik antar fakultas/BEM. Semakin kuat larangan fakultas terhadap organisasi ekstra kampus maka semakin kuat mahasiswa menentangnya. Perlawanan demi perlawanan terjadi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Tidak ada ikatan emosi tetapi justru membuka egoisme dan arogansi fakultas/kampus. Menurut informan bahwa: "Organisasi ekstra kampus yang *solid* dapat berfungsi meminimalisasi konflik antar fakultas/BEM. Semakin kuat larangan fakultas terhadap organisasi ekstra kampus maka semakin kuat mahasiswa menentangnya. Tidak ada ikatan emosi tetapi justru membuka egoisme dan arogansi fakultas/kampus." Pendapat ini semakin memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa praktik kekerasan mahasiswa merupakan produk dari struktur sosial dan politik.

Vandalisme dan Kemajemukan Mahasiswa

Ruang kontestasi yang terbuka antar mahasiswa dan antar kampus pada saat Pilkada (pemilihan gubernur dan wakil gubernur) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling menonjol dan terkait dengan persaingan antar etnis daerah (Organisasi Kedaerahan berbasis etnik dan masyarakat setempat menyebut dengan *Organda*) dalam merebut superioritas, dominasi, dan hegemoni. Hal ini disebabkan kemajemukan etnis di Sulawesi Selatan. Kemajemukan etnis dan kepentingan masyarakat itu tak muncul dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru tidak, karena pemerintah saat itu menerapkan kebijakan politik represif yang tujuannya meredam semua bentuk konflik kepentingan untuk tidak muncul ke permukaan.

Dalam konteks Pilkada dan peristiwa-peristiwa politik lain itu mahasiswa sering dimanfaatkan oleh kandidat dengan memanipulasi identitas dan simbol etnis untuk mendapatkan simpati dan suara sebanyak-banyaknya atas kandidat yang didukungnya itu. Kemajemukan etnis di Sulawesi Selatan dalam analisa politik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan, satu sisi kemajemukan etnis tersebut menjadi sumber harmoni sosial dan akulturasi politik sementara disisi yang lain dapat menjadi sumber konflik dan disintegrasi yang laten. Superioritas, dominasi dan hegemoni salah satu etnis terhadap etnis lainnya terkadang melahirkan resistensi bagi etnis yang disubordinasi.

Aktifitas penutupan jalan terjadi di sejumlah titik. Seperti mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar di Jalan Sultan Alauddin, mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) di Jalan AP Pettarani serta mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) di Jalan Perintis Kemerdekaan. Fenomena kekerasan yang terjadi di Makassar bukan lagi perihal yang menyangkut pada kontinuitas kasuistik yang banyak di beritakan oleh beberapa media. Kekerasan di Makassar jauh menekankan pada aspek postulat kausalitas, yaitu hukum dan ketentuan-ketentuan sebab-akibat, reaksi dari suatu aksi. Hal ini merupakan substansi (kebutuhan) yang membentuk perilaku. Jika eksistensi masyarakat telah melebur ke dalam asosiasi sosial, mereka harus berintegrasi pada pranata dan sistem nilai yang ada. Begitupun dengan mahasiswa, eksistensinya tidak dapat dipisahkan untuk tidak berintegrasi pada statuta kampus yang dipecah kedalam *rule of the game* birokrasi.

Maraknya tawuran mahasiswa antar fakultas di Unhas pada 31 Agustus dan 1 September 2005 merupakan bukti vandalisme mahasiswa yang paling

buruk karena diikuti dengan pembakaran kampus. Mahasiswa yang dalam polarisasi pemikiran seharusnya lebih bisa mengedepankan aspek dialogis dan lebih bisa memberikan reaksi kondusif terhadap situasi anarkis. Namun dalam kenyataannya ada kecenderungan mahasiswa berperan untuk menjadi aktor dari anarkisme. Ini bukan suatu peristiwa kebetulan, tetapi suatu tindakan yang diinginkan oleh mahasiswa sebagai pelaku. Tidak disangsikan lagi bahwa kekerasan yang dibangun/dikonstruksi oleh mahasiswa hampir tidak ada beda secara kualitatif dengan perilaku masyarakat non mahasiswa. Masyarakat setempat bahkan tukang becak menyebut mahasiswa itu identik dengan preman. Penyamaan perilaku mahasiswa dengan komunitas preman bukan tanpa alasan karena mahasiswa memiliki karakter dan perilaku yang menyerupai preman—tidak menggunakan nalar dan rasionalitasnya dalam berpikir dan bertindak, tetapi menggunakan emosi dan kekuatan fisiknya untuk melawan apa pun/siapa pun untuk mencapai dan meraih tujuannya/kepentingannya.

Dalam beberapa kasus nampak dengan jelas bagaimana komunitas mahasiswa tadi dengan sadar secara brutal bertindak selayaknya sekelompok preman yang sedang mengamuk. Kode etik kependidikan dan rasa toleransi dalam kampus tidak lagi menjadi sebuah hal yang harus dikedepankan. Banyak hal yang mendasari terjadinya anarkisme mahasiswa tersebut. Mulai dari bentuk protes atas ketidak-cocokan dengan kebijakan kampus sampai dengan kepada pembelaan harga diri dan arogansi pribadi yang pada proses kelanjutannya dapat menimbulkan konflik (horisontal) dalam komunitas akademik tersebut.

Kritisisme mahasiswa sesungguhnya didukung oleh sistem pendidikan tinggi yang kondusif, di mana kehidupan mahasiswa di kampus tidak lagi berada dalam kerangkeng besi pengawasan aparat negara dan ideologi yang represif. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk berpikir, berpendapat dan memiliki ruang untuk berekspresi. Kebebasan itu pula yang telah mengantarkan mahasiswa kembali masuk dalam kerangkeng besi irasionalitas yaitu kekerasan dan vandalisme. Aksi-aksi demonstrasi di kampus maupun di luar kampus merupakan wujud dari rasionalitas mahasiswa. Kekerasan itu tak terlepas dari struktur sosial budaya yang melingkupinya. Budaya kekerasan didukung dan direproduksi oleh budaya setempat, yakni Siri'.

Elite kampus berperan pada terjadinya kekerasan di kampus. Mahasiswa ditempatkan seorang aktor sosial, dalam hal ini sebagai individu-individu yang

terlibat di dalam aksi untuk mewujudkan perubahan sosial. Penandaan mahasiswa sebagai *agent of change* merepresentasikan aktor sosial kolektif dalam hal ini pemuda Mesir, untuk mencapai makna yang menyeluruh atas pengalaman mereka dalam memanifestasikan realitas yang diproyeksikan sebagai suatu realitas yang realitas akan yang penuh keberanian, kekuasaan, dan kegigihan untuk mewujudkan realitas kebebasan melalui aksi yang tidak mempertimbangkan lagi nilai-nilai moral dan sosial budaya. Suatu pengalaman bersama untuk mencapai realitas ideal yang selama ini dikonstruksi bersama-sama melalui jejaring sosial maya, sedang dimanifestasikan secara kolektif oleh aktor-aktor revolusi realitas. Singkatnya para konstruktor realitas adalah mahasiswa

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai sebab dan akibat dari ditempuhnya format aksi mahasiswa dengan kekerasan dan vandalisme. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi kepentingan publik akan direspon oleh mahasiswa dengan berdemostrasi/unjuk rasa sampai pada tindakan anarkis dan vandalisme. Mahasiswa adalah aktor plural bukan aktor tunggal dengan kepentingan tunggal. Mahasiswa terdiri dari beragam etnis, bergabung dalam berbagai fakultas, dan menyatu dalam berbagai universitas/institut baik negeri maupun swasta. Sebagai aktor plural mahasiswa memiliki kepentingan yang plural pula. Pluralitas kepentingan itu dapat menjadi pemicu konflik dalam mahasiswa tersebut. Secara eksplisit pluralitas mahasiswa memberi indikasi adanya *potensi konflik internal*. Kekerasan mahasiswa yang memperjuangkan isu terkait kepentingan umum dapat menjadi tindakan kolektif sejauh mempromosikan peran masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingannya. Tindakan kolektif di sini memuat unsur mobilisasi, pengembangan taktik yang lebih produktif untuk keberhasilan gerakan itu. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Ronald (2010) bahwa ketika kekerasan telah menjadi tindakan kolektif maka tujuan yang ingin dicapai dari tindakan itu adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum atau barang publik.

Dalam konteks pemikiran Eller (2006), akar kekerasan mahasiswa di Kota Makassar bisa disebut sebagai kekerasan terkait dengan masalah budaya modern. Kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa tidak ada kaitan dengan isu publik, tetapi terkait dengan kepentingan mereka sendiri untuk menarik perhatian pihak lain, baik itu pemerintah, pelaku media maupun masyarakat luas. Kekerasan itu berbeda karakteristiknya dari kekerasan-kekerasan

sebelumnya, tidak terjadi dalam arena akademis dan arena publik melainkan dalam arena sembarang di mana saja. Hal ini telah menjadi fitur utama dari kekerasan pada abad ke-21.

Simpulan

Mahasiswa sebagai habitus kekerasan dan kampus merupakan arena tempat diproduksi dan direproduksi berbagai bentuk kekerasan itu. Sebagai habitus, perilaku kekerasan merupakan perilaku kolektif yang dieskpresikan dalam bentuk tawuran, perkelahian, pengeroyokan, demonstrasi antara mahasiswa antar fakultas, antar universitas, antar organisasi intra kampus, antar organisasi ekstra kampus dan perkelahian antara aparat keamanan dan mahasiswa dan sebagainya

Pilihan mahasiswa untuk memperjuangkan sesuatu nilai atas nama kebaikan bersama/kepentingan umum sering kali berujung pada kekerasan. Kekerasan itu bukan tujuan tetapi sarana (alat), sehingga kekerasan itu tidak dapat dimaknai sebagai kekerasan itu sendiri, tetapi sebagai alat yang berfungsi jamak alat untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat ideal maupun praktis.

Tujuan itu selalu diperjuangkan, dan terkait dengan nilai yang dianggap benar dan harus diperjuangkan, sehingga kekerasan dalam konteks ini jauh dari domain gerakan politik. Contoh adalah kekerasan yang terjadi di kampus pada saat Orientasi Pengenalan Kampus (Ospek) pada suatu universitas merupakan suatu indikasi bahwa mahasiswa gemar menempuh cara-cara kekerasan dan selalu mengekspresikan kekerasan itu pada perilaku kesehariannya.

Data di lapangan menunjukkan bahwa kecenderungan itu merefleksikan kondisi sosial kultural masyarakat Makassar. Pada tataran normatif, mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan dan peran untuk melakukan kontrol sosial. Mahasiswa dalam lingkungan kampus dikonstruksi secara akademis dan mental untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan memberi koreksi sosial pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemampuan untuk berpikir kritis, berolah nalar menjadi modal sosial bagi mahasiswa dalam menafsirkan realitas sosial ekonomi dan politik empiris yang melingkupinya. Tanpa adanya kemampuan berpikir kritis dan menggunakan nalar pada diri mahasiswa dalam bertindak dan memahami realitas menyebabkan mahasiswa itu tidak lebih dari mesin kekerasan yang menghasilkan kebrutalan.

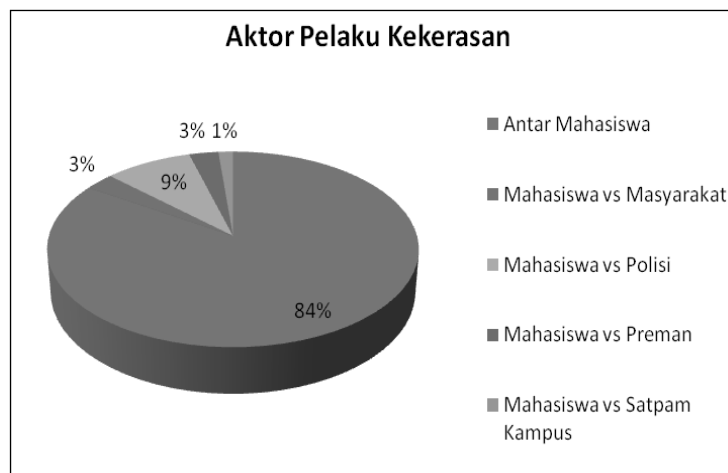
Mahasiswa sebagai mesin kekerasan bukan sesuatu yang berada di luar diri mahasiswa, tetapi mesin itu diciptakan dan digunakan oleh mahasiswa untuk membunyikan berbagai realitas, baik realitas ketimpangan, kesenjangan, ketidak-adilan, dan lain sebagainya. Berbagai realitas sosial, budaya, ekonomi maupun politik yang tidak sesuai dengan pemahaman atau persepsi mahasiswa diartikulasikan dengan kekerasan, seolah-olah kekerasan adalah segalanya dan menjadi pilihan rasional sebagai cara untuk memecahkan setiap persoalan yang ada. Persoalan ini menjadi masalah yang pantas dikritisi secara ilmiah guna merumuskan pemecahannya yang sangat penting untuk meminimalisir perilaku mahasiswa yang destruktif itu.

Dalam penelitian ini, mahasiswa sebagai kelompok mahasiswa orang dari berbagai etnis/suku dan bahasa yang berkumpul dalam suatu institusi pendidikan. Karakter kolektif mahasiswa dapat menjadi energi positif bagi perubahan sosial politik masyarakat dan negara, tetapi di sisi lain, kasadaran kolektif itu dapat meremukkan solidaritas internal mahasiswa itu.

Secara nyata kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh faktor sosial artinya ada peran faktor struktur menyebabkan terjadinya kekerasan itu. Struktur kampus, pemerintahan lokal setempat, dan struktur masyarakat. Struktur kampus mulai dari jenjang kuasa tertinggi yaitu Rektor sampai pada jenjang di tingkat Fakultas berperan dalam munculnya praktik kekerasan mahasiswa. Kampus bukan ajang regulasi aparat akademis untuk melucuti kekuatan mahasiswa, tetapi kampus adalah arena akademik tempat mengasah nalar yang bermental akademis dan bermoral.

Demikian pula dengan struktur pemerintahan lokal yang ada di Makassar bukan suatu lembaga alih-alih kekuasaan yang dibangun dengan sistem klientisme maupun paraohialisme, tetapi sebagai tempat kerja birokrat dalam menjalankan obligasi-obligasinya untuk melayani publik sesuai dengan wewenangnya. Karena itu, pemerintah lokal seharusnya dapat membaca dan mengambil sikap apabila kekerasan mahasiswa itu telah melampaui kelaziman. Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan regulasi untuk mencegah kekerasan yang diikuti dengan perusakan fasilitas publik.

Mahasiswa sebagai aktor intelektual yang berada dalam arena kampus memiliki kebebasan berelasi dengan aktor-aktor yang ada (ekonomi, politik) di arena kampus maupun di luar kampus. Yang paling mengesankan adalah kemampuan mahasiswa untuk



Sumber: Data diolah dari data Kekerasan yang dihimpun oleh Polda Sulawesi Selatan tahun 2010–2011

mengeksplorasi nilai budaya yang ada di masyarakat, nilai kekerasan budaya. Nilai-nilai kekerasan itu melingkungi keseharian mahasiswa, nilai itu nyata dan dipraktikkan. Hingga pada akhirnya, mahasiswa menjadi terbiasa untuk melakukan kekerasan bahkan kekerasan mahasiswa sudah distigma sebagai identitas baru mahasiswa dan ironisnya kekerasan dianggap sudah menyatu dengan kehidupan mahasiswa. Artinya, eksistensi mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, lingkungannya dan atau sistem sosial budayanya.

Kecenderungan kekerasan dan vandalisme mahasiswa Makassar untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya secara sengaja atau tidak telah melemahkan kearifan kultur lokal. Masyarakat tidak hanya menjadi rentan dan dirugikan dengan perilaku mahasiswa itu, tetapi didalam kehidupan nyata masyarakat telah ada kondisi (kemiskinan) yang secara empirik dimanfaatkan secara sistematis oleh aktor intelektual untuk mencapai tujuan tertentu. Pemecahan masalah kerusakan mahasiswa di Makassar dengan berbagai implikasi yang timbul, tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan kerusakan, demonstrasi anarkis, kekerasan saja, melainkan harus ditempatkan sebagai isu penting dan kritis yang perlu dianalisis dalam kerangka regulasi aktivitas mahasiswa dan kebijakan pendidikan tinggi yang menyangkut penataan kurikulum dan partisipasi politik di tingkat organisasi intra dan ekstra kampus.

Fenomena sosial kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Makassar merupakan produk tindakan-tindakan individual dan juga kolektif. Struktur sosial dan politik objektif dan representasi subjektif mahasiswa sebagai pelaku terjalin secara dialektis dan saling memengaruhi. Artinya, keduanya tidak saling menafikan, tapi berkelindan dalam sebuah praktik

kekerasan. Logika tindakan kekerasan mahasiswa memiliki dimensi rasionalitas dan irasionalitas.

Aksi-aksi mahasiswa di Makassar juga muncul akibat ketidakpuasan yang akumulatif, dan terjadi terus-menerus. Kekecewaan, kemarahan yang diekspresikan dengan kegiatan demonstrasi merupakan cara mahasiswa dalam merespon kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada juga fenomena kekerasan berupa aksi-aksi tawuran sesama mahasiswa serta tindakan beringas (vandalisme) mahasiswa dengan memblokir jalan, membakar ban mobil di tengah jalan telah menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat. Kekerasan mahasiswa merupakan refleksi dari ketidakteraturan masyarakat. Ketidakteraturan itu sebagai respon terhadap perilaku represif aparat keamanan (polisi) dan juga bias disebabkan oleh kekecewaan pada sistem sosial yang ada.

Posisi pelaku kekerasan selalu terkait dengan ruang dan konteks yang ditempati sehingga tidak lepas dari struktur yang melingkupinya. Aspek rasional dari kekerasan adalah untuk keperluan aktualisasi diri di luar bidang akademik. Sedangkan aspek irasionalitasnya adalah mereproduksi budaya kekerasan itu sendiri. Ada logika praksis yang menyebabkan berulangnya kejadian kekerasan sehingga menjadi habitus. Aspek rasionalitas dan irasionalitas merupakan satu kesatuan yang bersifat dualistik yang bergerak dalam ranah struktur dan kultur.

Pluralisme pendidikan merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diimplementasikan dalam bentuk praksis akademis. Mahasiswa yang berada dalam tatanan kampus itu plural dilihat dari asal daerah, kepentingan: aktualisasi diri atau yang lainnya. Mahasiswa terkait eksistensinya merupakan bagian dari tatanan kampus (institusi pendidikan tinggi)

dan mahasiswa terikat pada aturan-aturan kampus. Kekerasan mahasiswa tidak dapat dijelaskan secara parsial karena kekerasan itu multiaspek, banyak sebab, subjektif dan objektif, dorongan, semangat individual/bersifat personal sampai pada dorongan kolektif, objektif, dan bersifat massif.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk merevitalisasi kekuatan moral mahasiswa yang sudah digerogeti oleh kepentingan sesaat dan politis. Meski banyak pihak meragukan karakter, mental, dan moral dapat diajarkan dan diatasi dalam mata kuliah. Kalaupun ada KBKt dan KBKp, mereka hendaknya dimulai dan diikuti dengan pendekatan yang manusiawi dan beradab.

Masyarakat hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang diusung oleh mahasiswa. Masyarakat hendaknya lebih dewasa dalam bersikap dan bertindak. Karena aksi-aksi terbuka yang berlangsung di area publik selama ini mudah diprovokasi oleh masyarakat untuk tujuan lain. Masyarakat juga sering menjadi pembongkang aksi-aksi unjuk rasa bahkan berbaur sehingga aksi kekerasan pun tumpah ruah di jalan.

Suara dan kepentingan mahasiswa bukan suara dan kepentingan mahasiswa sendiri, melainkan suara masyarakat juga. Ini suatu indikasi bahwa mahasiswa berjuang untuk kepentingan masyarakat juga. Habitus yang mendukung dan mengkonstruksi mahasiswa melakukan kekerasan. Mahasiswa cenderung melakukan perlawanan dan berorientasi pada perubahan-perubahan struktural (demonstrasi yang mengusung isu-isu nasional, seperti UU BHP, UU bidang politik, dll).

Simpulan

Untuk mengatasi kekerasan mahasiswa dibutuhkan strategi edukatif. Strategi ini fokus pada upaya untuk menghasilkan pelaku sosial yang mampu memperbaiki cara-cara dalam artikulasi aspirasi dan kepentingannya melalui pengembangan sistem pendidikan melalui penguatan kemampuan berolah nalar dalam tataran praksis maupun akademis. Ada beberapa pilihan kebijakan yang mengarah pada status quo dan terkait dengan produksi dan reproduksi kekerasan mahasiswa yang tak terbantahkan secara sosial karena mahasiswa berelasi secara intensif dengan kekuatan struktur (kampus, pemerintah daerah, organisasi ekstra kampus, organisasi intra kampus, dan lingkungan tempat di mana mahasiswa menjalankan kehidupan kesehariannya di masyarakat seperti tempat pemondokan, asrama, rumah tinggal keluarga, dll).

Pemerintah seyogianya mengambil kebijakan yang lebih adaptif dengan kondisi mahasiswa seperti sekarang ini. Kebijakan itu bukan semata-mata mengatur, mendisiplinkan mahasiswa saja dengan menjejali kurikulum yang padat, tetapi bagaimana membangun jati diri mahasiswa di mana mahasiswa diberi ruang untuk berekspresi tidak hanya di ruang kampus tetapi di ruang publik. Dengan cara ini mahasiswa dapat memiliki kesadaran kritis yang positif untuk membangun bangsa ini. Kesadaran kritis itu tidak bersifat individual dan parsial tetapi kolektif. Kesadaran kritis yang dibangun dengan memanfaatkan nilai-nilai kolektif seperti kebaikan bersama, kepentingan umum dll. Hal ini sebagai cara untuk merawat kemajemukan mahasiswa juga. Sehingga pemerintah di tingkat lokal maupun pusat dapat mengambil tindakan tegas dan tidak gamang terhadap kasus-kasus kerusakan, kekerasan mahasiswa. Pemerintah tidak melakukan pembiaran atas aksi-aksi mahasiswa yang keluar dari rel kampus dan akademis. Jika kerusakan tidak dapat ditangani dengan baik dapat menjalar pada kekerasan yang lebih ekstrim di daerah-daerah lain.

Pengelolaan semua potensi mahasiswa merupakan kebijakan alternatif yang bisa diterapkan untuk memutus jaring kekerasan mahasiswa. Pengelolaan potensi itu bisa ditempuh dengan perbaikan metode belajar mengajar yang bersifat dialogis, tidak mengutamakan pendekatan yang bersifat teknis dan kaku. Untuk mencapai hal ini diperlukan perubahan dalam kebijakan perguruan tinggi. Seluruh civitas akademika tidak melakukan interpretasi secara tunggal kekerasan itu, tetapi menafsirkannya secara multiaspek. Karena kekerasan adalah bukan kekerasan itu sendiri. Kekerasan lebih merupakan manifestasi dari kebutuhan mahasiswa untuk memperoleh pengakuan atas jati diri sebagai mahasiswa yang kritis.

Daftar Pustaka

- Bryman A (2004) *Social Research Methods*. New York: Oxford Univ.Press.
- Collins R (1975) *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. New York: Academic Press.
- Eller JD (2006) *Violence and Culture: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach*. Belmont, CA: Thomson and Wadsworth.
- Fisher S (2000) *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*. London: Zed Books Ltd.
- Fransisco RA (2010) *Collective Action Theory and Empirical Evidence*. USA: Springer.
- della Porta D & Mario D (2006) *Social Movement: An Introduction*. USA: Blackwell Pub.